

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 8

TAHUN 2007

## Aksi pemblokiran jalan di Sidoarjo berhasil diatasi

Oleh LUTFIL HAKIM  
*Bisnis Indonesia*

SIDOARJO: Setelah 24 jam lebih aksi pemblokiran sejumlah jalan utama di Sidoarjo oleh ratusan warga Perumahan Tanggulangin Asri Sejahtera (TAS) Porong, siang kemarin berhasil diatasi oleh aparat kepolisian.

Sekitar satu satuan setingkat kompi Polisi sejak pukul 11.00 WIB kemarin berhasil membuka kembali jalur lalu lintas di Bundaran Waru, setelah sejak Kamis malam diblokir ratusan warga hingga kemarin pagi.

Namun, para warga yang berhasil dihalau itu terus merangsek ke arah jalan Gedangan, dan melakukan kembali aksinya memblokir perempatan jalan (*traffic light*). Armada polisi yang berada di Bundaran Waru meluncur ke lokasi dan menghalau para pendemo ke arah kota. Kali ini para warga Perum TAS itu berhasil dilokalisasi di Alun-Alun Kota Sidoarjo.

Dengan memanfaatkan momen salat Jumat, polisi berhasil menguasai sejumlah lokasi strategis di tengah kota, dan terus berjaga hingga sore hari. Para pendemo yang seba-

gian besar menjalankan salat di masjid dekat Alun-Alun, tampak mulai tidak solid lagi melihat pengamanan aparat kepolisian.

Dari pantauan *Bisnis*, hingga sore menjelang Maghrib kemarin, aparat kepolisian masih tetap berjaga-jaga di sejumlah lokasi, sementara alur lalu lintas Surabaya-Sidoarjo sudah berjalan lancar seperti semula. Begitu juga di jalan raya Porong yang sempat diblokir sejak Kamis pagi, pada sore kemarin sudah normal.

"Saya merasa lega, setelah dua hari terjebak macet di sini. Mau beli makan juga susah karena berada di dalam tol. Saya terpaksa makan mi instan direbus pakai air termos," kata Supari, sopir truk yang baru keluar dari pintu tol Sidoarjo mau ke arah Pasuruan.

Aksi warga itu dipicu oleh sikap pemerintah yang tidak jelas mengenai ganti rugi atas Perum TAS yang ditenggelamkan lumpur sejak beberapa minggu terakhir.

Ketua Timnas Penanggulangan Lumpur Basuki Hadimuljono pernah menyatakan bahwa warga Perum TAS pasti mendapat ganti-rugi, sementara Lapindo Brantas Inc. ber-

pegang kepada kesepakatan awal bahwa perumahan warga para pendemo tidak termasuk yang mendapat ganti rugi.

Aksi warga Perum TAS tidak hanya memblokir sejumlah jalan raya strategis, tapi juga memblokir jalur rel KA di Porong, sehingga sejumlah kereta dari Surabaya ke Jember, Banyuwangi, dan Malang, atau sebaliknya, terpaksa tidak beroperasi.

### Dialihkan via Kediri

Sementara itu, enam jadwal perjalanan kereta api terpaksa dialihkan melalui Kediri, Jawa Timur. "Enam kereta api yang dialihkan melalui jalur Blitar-Malang-Kertosono itu adalah yang sudah telanjur dijalankan," kata Kepala Resor Jalan dan Rel 74 PT Kereta Api Indonesia, Mochamad Soleh seperti dikutip *Antara*.

Menurut dia, kereta api pertama yang melewati emplasemen Stasiun Kediri pada pukul 08.40 WIB itu adalah rangkaian tangki kosong BBM dari Malang tujuan Surabaya.

Disusul kemudian rangkaian kereta tangki pengangkut BBM dari Surabaya menuju Malang, masuk di Kediri pukul 11.15 WIB.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 3

TAHUN 2007

## Royalti Rio Tinto sama dengan Inco

Oleh BAMBANG DWI DJANUARTO  
*Bisnis Indonesia*

JAKARTA: Pemerintah menolak keinginan Rio Tinto untuk mendapatkan royalti lebih rendah untuk pertambangan nikel di Lasampaha, Sulawesi, sehingga perusahaan tambang raksasa asal Inggris tersebut harus mengikuti ketentuan royalti yang tertuang dalam PP No. 45/2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku untuk Departemen ESDM.

"Royalti mereka akan ikut peraturan yang sudah ada sekarang [PP 45/2003] atau akan sama dengan PT Inco. Mereka sudah diberikan rezim pajak *naïl down* [berlaku te-

tap] tentu mereka harus ikut ketentuan yang sekarang," ujar Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Simon Felix Sembiring kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Dengan demikian, meskipun Rio Tinto memanfaatkan nikel di Lashampala yang kadarnya cukup rendah hanya 0,91%, mereka harus tetap membayar royalti nikel sama dengan nikel yang ditambang oleh PT Inco yang rata-rata di atas 2%.

Royalti PT Inco untuk nikel dengan kandungan di atas 2,5% ditetapkan sebesar US\$0,03 per kg kandungan ni-

kel dalam bijih dan untuk kadar dibawah 2,5% royaltinya US\$0,015 per kg kandungan nikel dalam bijih.

Rio Tinto menginginkan royalti yang lebih rendah dengan alasan pengolahan nikel kadar rendah membutuhkan teknologi tambahan, sehingga harus ada investasi lebih besar.

Jika royalti ditetapkan sama dengan Inco, pihak Rio Tinto maka perusahaan tersebut akan sulit bersaing dengan PT Inco karena harus mengeluarkan biaya yang lebih besar namun tetap dikenakan royalti yang besar.

Simon mengatakan pemerintah sudah menyetujui keinginan Rio Tinto dalam Kon-

trak Karya Generasi Ketujuh plus dengan menetapkan sistem perpajakan yang berlaku tetap dan pemberian status izin kehutanan yang juga tetap karena itu perusahaan tersebut harus konsisten terhadap pilihan yang diinginkan.

Rio Tinto sudah mengajukan permohonan untuk mengembangkan pertambangan nikel terpadu di Lasampaha, Sulawesi, dengan nilai investasi US\$2 miliar tersebut sejak 2001 namun baru pekan ini usai rapat di Kantor Wapres, kontrak karya tersebut disetujui pemerintah.

Pada Rabu lalu, hasil rakor yang digelar di kediaman Wapres dengan dihadiri Menko Perekonomian Boediono, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menhut MS. Kaban, Kepala BPKM M. Lutfi dan Menteri ESDM Purnomo Yugiantoro menetapkan pemerintah menyetujui kontrak karya Rio Tinto.

"Sebagai tindak lanjut nanti setelah kontrak karya ditan-datangani oleh Pemerintah maka akan dikonsultasikan dengan DPR sesuai dengan UU No. 11/1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan Umum."

Dengan disetujuinya kontrak karya Rio Tinto di Lasampaha maka ini akan menjadi kontrak karya terakhir sebelum disahkannya RUU Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi UU.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<ul style="list-style-type: none"> <li>● BISNIS INDONESIA</li> <li>○ INVESTOR DAILY</li> <li>○ KOMPAS</li> <li>○ KORAN TEMPO</li> <li>○ MEDIA INDONESIA</li> <li>○ PIKIRAN RAKYAT</li> <li>○ RAKYAT MERDEKA</li> <li>○ REPUBLIKA</li> <li>○ SUARA KARYA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ SEPUTAR INDONESIA</li> <li>○ SUARA PEMBARUAN</li> <li>○ SINAR HARAPAN</li> <li>○ TABLOID KONTAN</li> <li>○ THE JAKARTA POST</li> <li>○ MAJALAH GATRA</li> <li>○ MAJALAH TEMPO</li> <li>○ MAJALAH TRUST</li> <li>○</li> </ul>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM
JAN <b>FEB</b> MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 <b>24</b> 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : B.1		TAHUN 2007

## Dana Pensiun Inco buru obligasi

Oleh ANUGERAH PERKASA  
*Bisnis Indonesia*

JAKARTA: Investasi Dana Pensiun PT International Nickel Indonesia (Inco) Tbk dialihkan dari semula deposito menjadi obligasi hingga komposisinya mencapai 70% dari total penempatan dana.

Ketua Dana Pensiun Inco Dedy Novianto mengatakan peralihan itu dilakukan karena obligasi korporasi maupun surat utang negara (SUN) merupakan jenis investasi yang cocok dengan kebutuhan jangka panjang industri dana pensiun. Selain itu, sambung dia, pihaknya juga melakukan studi lebih dulu sebelum pengalihan jenis investasi dilakukan.

"Peralihan itu dilakukan pada awal Januari lalu. Pada 2006, komposisinya itu adalah 70% untuk deposito, dan 45% untuk deposito. Sedangkan kini 70% untuk obligasi, deposito 20% dan saham 20%," ujar Dedy kepada *Bisnis*, di Jakarta kemarin.

Dedy mengungkapkan peralihan itu juga lebih disebabkan oleh faktor demografi peserta dana pensiun Inco sendiri. Sebelumnya, lanjut dia,

pengurus dana pensiun lebih memilih instrumen jangka pendek, seperti deposito, dalam menempatkan dana kelolaannya.

Dia menjelaskan komposisi penempatan dana untuk obligasi saat ini adalah 15% untuk korporasi dan 55% untuk SUN. Dedy juga optimistis regulator mendukung pengalihan investasi jangka pendek menjadi jangka panjang dengan memberikan perlindungan terhadap jenis instrumen tersebut.

### Nilai penjaminan

Menurut Dedy, pengalihan jenis investasi itu juga salah satunya disebabkan adanya penurunan nilai jaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Rp100 juta pada Maret 2007. Namun, sambung dia, itu bukan alasan utama dilakukannya pengalihan investasi deposito menjadi obligasi.

Sebelumnya Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Eddy Praptono mengungkapkan dana pensiun diminta menggunakan instrumen investasi jangka panjang karena sesuai dengan kebutuhan dana pensiun dalam me-

enuhi kewajiban manfaat pensiun bagi pesertanya. Selain itu, sambung dia, investasi itu juga berguna bagi pemerintah dalam proses pembangunan.

Lebih lanjut Dedy menuturkan, penempatan investasi jangka panjang juga tergantung dengan ukuran dana pensiun itu sendiri. "Kalau asetnya hanya satu sampai sepuluh miliar, kemungkinan hanya bisa menempatkan dananya di deposito. Kalau bermain di obligasi dan saham itu sangat kecil."

Dana Pensiun Inco memiliki aset sekitar Rp270 miliar pada akhir 2006 atau meningkat 47% dibandingkan periode yang sama 2005 yang mencapai 183 miliar. Kenaikan itu berasal dari iuran dari pemberi kerja dan hasil investasi yang mencapai 17% atau sekitar Rp214 miliar.

Menurut Dedy, penempatan investasi juga harus dibekali dengan manajemen risiko sehingga pengurus dana pensiun dapat meminimalisasi risiko penempatan dana dalam instrumen investasi tertentu. Dia mencontohkan pengurus dana pensiun harus jeli dalam menanamkan dananya.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM									
JAN	<b>FEB</b>	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23	<b>24</b> 25 26 27 28 29 30 31								
HALAMAN: A.14										TAHUN 2007	

# Penanganan Lumpur Kurang Dana

Disiapkan opsi penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja negara.

JAKARTA — Dana penanganan lumpur Lapindo sebesar Rp 1,3 triliun, yang disediakan Lapindo Brantas Inc., sudah hampir habis. Pemerintah belum memutuskan apakah menyediakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau tidak.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan diperkirakan pada 8 Maret nanti akan terjadi defisit dana penanganan lumpur. "Kami sedang memikirkannya saat ini," ujarnya kemarin.

Lapindo telah menyepakati menyediakan dana Rp 3,8 triliun un-

tuk penanganan lumpur sesuai dengan keputusan presiden tentang penanganan lumpur. Dana tersebut terdiri atas Rp 1,3 triliun untuk penanganan lumpur di atas dan bawah permukaan serta Rp 2,5 triliun untuk penanganan masalah sosial.

Penanganan lumpur kini ditangani Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, yang akan berakhir pada 8 Maret nanti. Hingga kini pemerintah belum memutuskan pembentukan tim atau badan baru untuk menangani kasus tersebut.

Menurut Purnomo, setelah masa kerja Tim Nasional berakhir, pihaknya menunggu instruksi Presiden. "Belum diputuskan apakah akan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau tidak," katanya.

Saat ini Tim Nasional, kata Purnomo, sedang menyiapkan relokasi infrastruktur, yang meliputi jalan tol, jalan arteri nasional, jalur kereta api, dan infrastruktur energi, seperti transmisi 150 kilovolt dan pipa gas. Selain itu, Tim Nasional sedang menyiapkan tanggul permanen untuk mengalirkan lumpur sejajar dengan Sungai Porong langsung ke Selat Madura.

Dia mengatakan hingga kini belum ada keputusan siapa yang akan menanggung biaya relokasi infrastruktur dan pembangunan tanggul tersebut. Dalam waktu dekat, Tim Nasional akan melakukan studi keekonomian dan keteknikan. "Tim sedang menghitung biayanya," kata Purnomo.

Pemerintah, kata dia, sedang melakukan pembahasan bentuk badan untuk menggantikan Tim Nasional.

Menurut Purnomo, ada beberapa alternatif usul, antara lain berbentuk badan pengelola, masa kerja Tim Nasional dilanjutkan atau berbentuk suatu proyek yang ditangani sektor masing-masing, dan berbentuk seperti badan rehabilitasi dan rekonstruksi, seperti di Aceh dan Yogyakarta. "Hasil bahasan akan disampaikan kepada Presiden," katanya.

Purnomo mengatakan penanganan lumpur Lapindo akan dilakukan melalui dua cara. Pertama, lumpur dibuang ke Sungai Porong. Setelah jangka panjang, akan dibuat tanggul permanen menuju ke selatan sungai itu. Kedua, dengan dengan bola beton untuk mengurangi laju lumpur ke permukaan. "Sekitar seribu lebih bola beton akan ditanam untuk mengurangi laju aliran," ujarnya. ● NIEKE INDIHETA

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM									
JAN	<b>FEB</b>	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23	<b>24</b>	25 26 27 28 29 30 31							
HALAMAN : 16											TAHUN 2007

LUMPUR LAPINDO

# Bola Beton Gagal Masuk ke Pusat Semburan

**SIDOARJO (Media):** Upaya memasukkan bola-bola beton ke pusat semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, yang dijadwalkan dilakukan kemarin, dipastikan ditunda. Selain faktor cuaca yang tidak mendukung, ada persoalan teknis di lapangan.

"Kami masih berusaha mengangkut kawat baja yang tersedot lumpur dan belum berhasil. Kalau sudah berhasil, nanti tergantung timnas kapan bola dimasukkan," kata Kepala Teknis Lapangan Zainal Arifin.

Kawat baja yang tersedot itu memang melintas di pusat semburan yang dihubungkan dari dua sisi tanggul utama. Nantinya kawat itu menghubungkan dua menara guna memasukkan bola beton.

"Rencananya, bola beton itu dimasukkan hari ini (kemarin). Namun,

kawasan Porong mendung dan di Kabupaten Sidoarjo banyak yang diguyur hujan," tutur Ketua Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Rudi Novrianto. Ia menyebutkan hari ini akan dicoba lagi upaya tersebut.

Sementara itu, pemblokadean jalan oleh warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera Sidoarjo berlanjut dan makin meluas pada hari kedua kemarin. Akibatnya, jalan akses menuju Sidoarjo dari semua arah lumpuh. Padahal jalan itu menghubungkan beberapa jalur kota di Jawa Timur.

Jalur di Jalan Raya Porong sempat dibuka warga selama 30 menit setelah para sopir truk protes. Selain kehabisan waktu, mereka kesulitan mendapatkan makanan, minuman, dan menipisnya uang saku.

"Saya sudah terjebak sejak Kamis (22/2) pukul 10.00 WIB hingga sekarang. Padahal uang saku sudah tipis," kata Effendi, 35, salah satu sopir.

Di sisi lain, PT Kereta Api (KA) tidak mengoperasikan kereta api setelah warga juga memblokade rel. PT KA hanya mengoperasikan kereta komuter dari Surabaya hingga Stasiun Tanggulangin, Sidoarjo.

Menurut Kepala Humas PT KA Daerah Operasi IX Eko Suminto, sedikitnya terdapat lima perjalanan KA dari Banyuwangi dan Jember menuju Surabaya gagal diberangkatkan.

"Sekitar 1.300 calon penumpang harus menggunakan sarana transportasi lain, atau batal pergi," kata Eko. KA yang gagal diberangkatkan itu di antaranya dua perjalanan KA Muti-

ara Timur Malam, KA Cantik, dan KA Logawa koridor Jember-Surabaya dan sebaliknya.

KA Mutiara dari Surabaya menuju Banyuwangi terpaksa mengambil jalur tengah. Pengalihan jalur ini mengakibatkan waktu tempuh dua kali lipat lebih lama daripada biasanya yang cuma enam jam. KA Sritanjung jurusan Banyuwangi-Yogyakarta harus mengalihkan jalur melalui Kertosono dan Malang, untuk menghindari lokasi blokade. Eko berharap blokade warga itu bisa segera berakhir.

Sementara itu, kerugian juga menimpa PT Jasa Marga. "Sejak Kamis (22/2) pagi ditutup hingga Jumat pagi, kerugian sudah mencapai Rp100 juta," tutur Kepala Jasa Marga Surabaya Subakti Syukur.

(HS/FL/AM/N-4)



**BOLA BETON:** Dua pekerja memasang kawat baja pada bola-bola beton yang akan digunakan untuk menutup lubang pusat semburan lumpur panas Lapindo Brantas di Desa Siring, Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin. Pemasangan bola-bola beton seberat 400 kg itu terhambat karena demonstrasi masyarakat dan hujan yang melanda daerah tersebut. ■ AFP/TRISNADI

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN    **FEB**    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 **24** 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : **A**

TAHUN 2007

### Truk Tangki Terbakar

Dua truk tangki bahan bakar minyak (BBM) jenis premium berkapasitas masing-masing 16.000 liter dan sebuah truk tangki gas elpiji berkapasitas 8.400 liter, Jumat (23/2), hangus terbakar. Kebakaran terjadi di Pertamina Terminal Transit (Depo) Manggis, Karangasem, Bali. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun sopir salah satu truk tangki mengalami luka di kakinya.

Kapolres Karangasem, AKBP Gusti Made Adi S Putra mengatakan, terkait dengan kasus kebakaran ini pihaknya menerjunkan tim dari Laboratorium Forensik Polres Karangasem untuk melakukan penyidikan di tempat kejadian perkara. "Sekarang tim bekerja dan hasilnya belum dapat disimpulkan apakah karena unsur kecelakaan, kelengahan, atau ada unsur kesengajaan. Yang jelas proses penyidikan terus dilakukan," katanya.

Sementara itu, Kepala Pertamina Terminal Transit Manggis, Muhammad Irfan mengatakan, peristiwa terbakarnya dua truk tangki tersebut tidak akan mengganggu pasokan BBM di seluruh wilayah Bali. [137]

27

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**MONITOR BERITA**

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM
JAN <b>FEB</b> MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 <b>24</b> 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 8		TAHUN 2007

## Perlu Tegass terhadap Lapindo

**P**enanganan semburan dan luberan lumpur panas di lokasi penambangan Lapindo Brantas, di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, tak kunjung tuntas, walaupun bencana itu sudah berlangsung sembilan bulan. Kerugian terbesar dialami warga di sekitar lokasi penambangan, yang harus tergusur meninggalkan kehidupan mereka dan mencari tempat tinggal baru.

Belum lagi kerugian para pengusaha yang kehilangan tempat usaha, dan semua yang dirintisnya selama bertahun-tahun. Negara pun tak ketinggalan juga didera kerugian akibat hancurnya infrastruktur dan fasilitas publik.

Semua kondisi itu belum terpulihkan. Bahkan bayangan pemulihan kehidupan mereka yang dirugikan, dalam hal ini oleh PT Lapindo Brantas Inc sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, masih jauh dari harapan dan terkesan lamban.

Salah satu indikasi kuat adalah tindakan warga yang memblokir jalan tol, jalan arteri, dan jalur rel kereta api di sekitar lokasi semburan. Aksi massa itu jelas dipicu ketidakpuasan warga terhadap Lapindo, dan juga mungkin pemerintah, menyangkut ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Pemblokiran itu jelas membawa dampak buruk. Mobilitas manusia dan barang menjadi terhambat, sehingga perekonomian menjadi lumpuh untuk beberapa saat.

Bagi warga, proses ganti rugi yang disepakati bersama Lapindo dan pemerintah dikhawatirkan hanya manis di bibir. Karena, apa pun yang ditawarkan dalam ganti rugi itu, warga tetap saja dirugikan. Penggantian harta, berapa pun nilainya, tak akan mampu menggantikan kerugian waktu dan segala yang telah dicapai warga selama tinggal di sekitar wilayah semburan.

Warga harus rela memulai kehidupan dari nol di tempat yang baru. Anak sekolah terpaksa menyesuaikan diri di sekolah yang baru. Mereka yang dulu

berdagang, misalnya, kini harus merintis usahanya dari awal.

Hal yang tak kalah pentingnya, warga harus memulai kehidupannya dari awal di lingkungan yang baru. Kondisi seperti itulah yang tak ternilai harganya, yang harus dilihat oleh pemerintah dan Lapindo. Itulah yang memicu aksi massa, manakala warga merasa proses ganti rugi tidak memadai.

Persoalan Lapindo memang begitu luas. Tak berhenti pada masalah ganti rugi kepada warga, masalah mahapelik yang tak mudah untuk dituntaskan tentunya bagaimana menghentikan semburan lumpur panas dalam waktu singkat. Berdasarkan kajian, semburan itu akan berhenti secara alami dalam kurun 31 tahun. Tetapi, apakah kita harus menunggu selama itu? Tentu saja tidak.

Sayangnya, hingga kini upaya penghentian semburan tak kunjung membuahkan hasil, bahkan terkesan lamban. Terkait hal itu, kita mengingatkan pemerintah bahwa tim nasional yang dibentuk Presiden untuk mencari upaya penghentian semburan, akan berakhir masa tugasnya Maret mendatang.

Tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita, setelah itu, siapa yang bertanggung jawab untuk mengupayakan penghentian semburan lumpur. Di sisi lain, tampaknya kita tidak bisa menggantungkan dan menyerahkan sepenuhnya upaya penghentian itu hanya kepada Lapindo. Hal-hal itulah yang harus dijawab pemerintah.

Dalam kasus Lapindo, kita merasa pertanggungjawaban yang dilakukan Lapindo belum maksimal. Langkah-langkah penyelesaian, baik ganti rugi maupun penghentian semburan, tak optimal. Demikian pula aspek pertanggungjawaban hukum dari manajemen Lapindo, juga tenggelam ditelan waktu.

Untuk mengatasi itu semua, demi tegaknya keadilan publik di negeri ini, pemerintah perlu bersikap tegas kepada Lapindo, untuk mempertanggungjawabkan bencana yang terjadi.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 19		TAHUN 2007

Atasi Semburan Lumpur Lapindo

# Warga Akan Diperjuangkan Dapat Ganti Rugi

[SIDOARJO] Bupati Sidoarjo Win Hendrarso akan terus memperjuangkan aspirasi warga yang terkena dampak lumpur PT Lapindo Brantas untuk mendapatkan ganti rugi *cash and carry*, termasuk kepada warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS) di Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

"Pertemuan dengan warga belum mendapatkan kesepakatan atau *deadlock* sehingga proses negosiasi akan dilanjutkan ke pemerintah pusat," kata Win di Sidoarjo, Jumat (23/2).

Saat ditanya, mengapa pemerintah pusat tetap merelokasi, sementara warga mengharapkan tunai, Win mengaku itu adalah kebijakan dari pemerintah pusat. "*Decision maker*nya adalah pemerintah pusat. Kami di sini sudah *all out* memperjuangkan aspirasi warga," katanya.

Dengan memblokir jalan dan menutup jalur rel kereta api, akan menimbulkan dampak yang berat bagi masyarakat dan akan mengurangi simpati masyarakat lainnya. "Saya memahami perasaan warga

yang menderita, tetapi saya hanya bisa mengimbau kepada warga yang berunjuk rasa agar tidak melakukan hal yang merugikan masyarakat lain, karena banyak yang menderita," katanya.

Sementara itu, Humas PT Kereta Api (KA) Daop VIII, Sudarsono saat meninjau kawasan Stasiun Waru mengatakan, kereta Mutiara Timur sudah berangkat melewati jalur tengah, sedangkan KA Penataran jurusan Surabaya-Blitar harus melewati Mojokerto, Jombang, melewati Kertosono atau melalui jalur selatan. "Tapi, Mutiara Timur hanya bisa berjalan sekali saja, yang semestinya bisa berjalan 2 kali, pagi dan malam," katanya.

Meski tidak ada keluhan penumpang, pihaknya memberikan saran kepada penumpang yang melakukan perjalanan ke Surabaya agar lewat Malang-Blitar, yakni dari Stasiun Banyuwangi ke Bangil dan menuju ke arah selatan atau Malang. Setelah itu meneruskan perjalanan ke Blitar, Kediri, Mojokerto, dan Surabaya.

"Akibat perubahan jalur perjalanan ini, mereka yang bisa menem-

puh perjalanan 5 hingga 6 jam, akhirnya harus mengalami kemoloran 3 hingga 4 jam," katanya.

Meski aksi unjuk rasa warga Perum TAS masih berlangsung hingga siang, namun mereka tetap tidak melupakan ibadah. Ratusan warga itu menggelar salat Jumat di Jl Raya Porong.

Sementara itu, Yuniwati Teriana, perwakilan dari Lapindo mengatakan, Lapindo tetap berpegang pada keputusan presiden tentang daerah terkena dampak, di mana warga Perum TAS tidak masuk dalam daerah terdampak. Kalau Perum TAS yang semula tidak masuk daerah terdampak dan saat ini tenggelam oleh lumpur, Tim Nasional (Timnas) juga harus ikut bertanggung jawab, jangan hanya Lapindo.

"Timnas itu kan juga termasuk pihak pemerintah, dan ada tim pengarah itu bisa menteri atau siapa yang nantinya juga harus bicara bagaimana seharusnya, termasuk siapa yang akan mengganti. Karena kita akan ganti pada wilayah yang sudah kita sepakati," katanya.

Sementara itu, dua truk tangki pengangkut 20.000 metriks ton LPG yang terjebak di Raya Porong karena aksi blokade warga Perum TAS, akhirnya diperbolehkan lewat, karena dikhawatirkan akan meledak.

Kepala Lingkungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) Pertamina UPMS V Surabaya, TP Pasari-bu menjelaskan, truk tangki yang tertahan di Porong tersebut berada di Raya Porong mulai Kamis.

Altus, perwakilan warga Perum TAS mengaku kecewa dengan hasil perundingan di rumah dinas Gubernur Jatim, Jumat (23/2) pagi, karena pemerintah tetap memaksakan relokasi. "Pemerintah seharusnya bisa memahami aspirasi warga Perum TAS yang rumahnya kini terendam lumpur, menuntut ganti rugi seperti halnya warga di empat desa lainnya, seperti Siring, Jatirejo, Renokeno, Kedungbendo," katanya.

Juru Bicara Timnas, Rudy Novrianto mengatakan, uji coba memasukkan bola beton ke dalam sumber lumpur berhasil dilakukan, sekalipun sempat menghadapi kendala. [029/080/070]